



RENCANA KERJA

DINAS SOSIAL KOTA BANDAR LAMPUNG

TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2024

Lampiran I Surat Nomor : B/1171/000.7.2.6/IV.01/2024
Tanggal : 10 Juli 2024

**GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN
RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017**

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	BAB I	PENDAHULUAN	✓			
	1.1	Latar Belakang	✓			
	1.2	Landasan Hukum	✓			
	1.3	Maksud dan Tujuan	✓			
	1.4	Sistematika Penulisan	✓			
2	BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU				
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tabel T-C.29	✓			
	2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tabel T-C.30	✓			
	2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	✓			
3	BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH				
	3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional				
	3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah				
	3.3	Program dan Kegiatan Tabel T-C.33.	✓			
4	BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	✓			
5	BAB V	PENUTUP	✓			

Bandar Lampung, Juli 2024
Kepala Dinas Sosial
Kota Bandar Lampung,

AKLIM SAHADI, S.Kom., M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19740615 199703 1 003

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung

DINI PURNAMA WATY, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19700218 199303 2 002

Diverifikasi : 23 Juli 2024		Tanda Tangan
1	Dra. Rr. DIAH SULISTIORINI, M.Si NIP. 196908011993032009 Plt. Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida	
2	YANTI NURANI, S.E., MM. NIP. 196609301996032001 Jf. Perencana Ahli Muda	

FORMULIR E.70
PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN
RENJA PERANGKAT DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.				
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.				
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota.				
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.				
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.				
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.				
8.	Penelaahan usulan masyarakat.				
9.	Perumusan kegiatan prioritas.				
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.				
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.				
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.				
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.				
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.				
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.				
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.				
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan.	-		Belum sampai pada tahapan tersebut	

Bandar Lampung, Juli 2024
Kepala Dinas Sosial
Kota Bandar Lampung,



AKLIM SAHADI, S.Kom., M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19740615 199703 1 003

Diverifikasi : 23 Juli 2024		Tanda Tangan
1	Dra. Rr. DIAH SULISTIORINI, M.Si NIP. 196908011993032009	
	Plt. Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida	
2	YANTI NURANI, S.E., MM. NIP. 196609301996032001	
	JF. Perencana Ahli Muda	

Mengetahui,
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung

DINI PURNAMA WATY, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19700218 199303 2 002

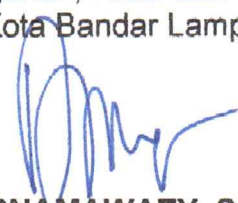
FORMULIR E.71
KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN RENJA
PERANGKAT DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Perumusan prioritas dan sasaran tahunan Perangkat Daerah telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan tahunan daerah serta mengacu pada RKPD dan RKP.	Telah Sesuai.
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerah serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	Telah Sesuai

Bandar Lampung, 23 Juli 2024

Diverifikasi : 23 Juli 2024		Tanda Tangan
1	Dra. Rr. DIAH SULISTIORINI, M.Si NIP. 196908011993032009	
	Plt. Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida	
2	YANTI NURANI, S.E., MM. NIP. 196609301996032001	
	JF. Perencana Ahli Muda	

Mengetahui
Plt. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah Kota Bandar Lampung



DINI PURNAMAWATY, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19700218 199303 2 002

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang	4
Landasan Hukum	6
Maksud dan Tujuan	8
Sistematika Penulisan	9

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	12
Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	28
Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	30
Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	32
Penelaahan Usulan dan Kegiatan.....	40

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	44
Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	45
Program dan Kegiatan	46

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN 8
PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR
TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA AWAL PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Bagian Kedua Pasal 11 menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah.

Rencana Pembangunan Daerah terdiri atas RPJPD untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan RKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sedangkan Renstra Perangkat Daerah jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung T.A 2025

Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 13 ayat (2) menyebutkan bahwa Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Tahun 2022, merupakan rencana pembangunan tahunan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung yang pada dasarnya disusun untuk mendukung terwujudnya Visi Walikota

Bandar Lampung Tahun 2021-2026, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu : **“BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, NYAMAN, UNGGUL BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT”**

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 7 (tujuh) misi yang disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan yang meliputi :

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat.
3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius.
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.

7. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung dan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah Daerah dalam hal Bidang Sosial. Dengan demikian Dinas Sosial Kota Bandar Lampung menjadi salah satu Perangkat Daerah yang terkait dengan misi ke-4 (empat) dalam RPJMD Tahun 2021–2026 yaitu ***Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah berlandaskan pada ekonomi kerakyatan..*** Guna mewujudkan visi dan misi tersebut diatas, pada Tahun 2025 Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. menyusun Renja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Tahun 2024 berdasarkan Renstra Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2025 yang akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung pada Tahun Anggaran 2025.

LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusun Renja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

Renja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung T.A 2025

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

- Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 13);
 15. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);
 16. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 23 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022

(Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 23);

17. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor Tahun 2024
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 Berita
Daerah Tahun 2024

MAKSUD DAN TUJUAN

Renja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan RKPD Tahun 2025, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Walikota.
2. Sebagai acuan bagi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025.
3. Sebagai acuan bagi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan satu tahun ke depan.

SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra** **Perangkat Daerah**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung tahun-tahun sebelumnya.

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Menguraikan tentang Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, hal krisis yang terkait, dan permasalahan yang dihadapi serta hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. Tantangan dan Peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa Rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **Telaahan terhadap kebijakan Nasional**

Menjelaskan tentang arah kebijakandan prioritas pembangunan nasional terkait tupoksi. Tujuan dan Sasaran Renja, Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan terhadap Tujuan dan sasaran yang didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial

Kota Bandar Lampung.

Program dan Kegiatan

Berisikan tentang faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan, jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan tentang rencana kerja dan Pendanaan Tahun 2025.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai

dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA

Didalam setiap kegiatan membutuhkan suatu evaluasi dimana evaluasi itu dapat menilai semua kekurangan dan kelebihan dalam suatu organisasi menjalankan kegiatan tersebut , dalam hal ini Dinas Sosial juga perlu membuat sebuah evaluasi Renja untuk dapat menilai seberapa jauh kegiatan yang sudah berjalan serta dapat membuat perencanaan kerja terbaik untuk tahun yang akan datang, Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Sosial. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban dalam bentuk angka yang dilaksanakan secara periodik.

Rencana Kerja OPD tahun 2025 disusun berdasarkan analisa kondisi objektif permasalahan pembangunan saat ini. Analisis kondisi objektif diharapkan dapat memberikan gambaran permasalahan yang masih dihadapi OPD. Gambaran permasalahan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang dihadapi OPD saat ini serta estimasi kondisi yang akan datang. Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan rencana kerja OPD Tahun 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

- a. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - c. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - d. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - f. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah
- Pada program ini seluruh kegiatan telah terealisasi sehingga capaian kinerja mencapai 81.82 persen.

2. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

- a. Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti sosial
- b. Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/Aids dan NAPZA diluar panti social

Pada program ini seluruh kegiatan telah terealisasi sehingga capaian kinerja mencapai 31.604 persen.

3. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

- a. Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota

Pada program ini seluruh kegiatan telah terealisasi sehingga capaian kinerja hanya mencapai 20.75 persen.

4. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

- a. Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota
Pada program ini seluruh kegiatan telah terealisasi sehingga capaian kinerja mencapai 71.51 persen.

5. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

- a. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota
Pada program ini capaian kinerja mencapai 93.925 persen.

**REKAPITULASI LAPORAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN KINERJA ANGGARAN DAERAH APBD
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023
TRIWULAN IV BULAN DESEMBER 2023**

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN		
					TOTAL		
					ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	DINAS SOSIAL KOTA BANDAR LAMPUNG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.762.558,00	14.505.558,00	77,31%
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.292.251.184,00	2.524.765.149,00	76,69%
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	94.200.000,00	86.870.000,00	92,22%
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	5.000.000,00	2.550.000,00	51,00%
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.000.000,00	8.705.410,00	96,73%
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.400.000,00	39.868.365,00	96,30%
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000,00	9.951.400,00	99,51%
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.025.000,00	4.650.000,00	77,18%
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.865.160,00	11.897.400,00	80,04%
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81.500.000,00	50.288.536,00	61,70%
				Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan perundang undangan	5.000.000,00	4.920.000,00	98,40%
				Fasilitas Kunjungan Tamu	3.975.000,00	3.710.000,00	93,33%
			Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	159.972.454,00	159.370.000,00	99,62%
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.576.666,00	41.161.104,00	45,44%
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	310.000.000,00	284.000.000,00	91,61%
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.116.929,00	43.827.130,00	97,14%
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.932.088,00	27.293.000,00	75,96%
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.000.000,00	9.895.000,00	44,98%
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000,00	149.309.000,00	99,54%
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	Peningkatan Kemampuan Kompetensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kabupaten/kota	80.000.000,00	77.998.325,00	97,50%
				Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota	7.914.500.000,00	7.151.127.162,00	90,35%
				Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)	300.000.000,00	-	0,00%
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti sosial	Penyediaan Permakanan	60.650.126,00	3.005.500,00	4,96%
				Penyediaan Sandang	60.000.000,00	2.545.700,00	4,24%
				Penyediaan Alat Bantu	214.161.988,00	87.620.458,00	40,91%
			Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA	20.000.000,00	4.540.000,00	22,70%
				Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota	94.000.000,00	80.100.000,00	85,21%
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	450.000.000,00	93.828.329,00	20,85%
				Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	1.724.277.546,00	1.668.392.700,00	96,76%
				Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Sosial	4.822.138.855,00	4.673.463.500,00	96,92%

Renja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung T.A 2025

		PROGRAM PENANGAN BENCANA	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	Penyediaan makanan	177.861.145,00	36.901.200,00	20,75%
				Penyediaan Sandang	27.718.438,00	-	0,00%
				Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	31.396.418,00	-	0,00%
				Pelayanan Dukungan PsikoSosial	18.269.755,00	-	0,00%
	Jumlah Bulan ini				-	-	0,00%
	Jumlah bulan lalu				-	-	0,00%
					20.390.551.310,00	17.357.059.926,00	85,12%

PENCAPAIAN TAHUN ANGGARAN 2025

Capaian Kinerja Tahun 2025 Dinas Sosial Kota Bandar Lampung atas Rencana Kerja Tahun 2025 dinilai Sedang menurut Kriteria Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Khusus pada Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma, kesulitan ditemui pada Refocusing Anggaran, begitu pula yang terjadi pada Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Lansia.

Kondisi Pandemi yang terjadi berefek pada kondisi perekonomian yang menurunkan daya beli masyarakat, maka dalam fungsinya sebagai pelaksana Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas pada Visi dan Misi Kepala Daerah dalam Rencana Strategis Daerah yang dituangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026

Arah Kebijakan yang diambil sesuai dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bandar Lampung sesuai dengan misi ke empat yang ditugaskan kepada OPD Dinas Sosial Bandar Lampung adalah Melakukan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menjadi mandiri.

TABEL T-C.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA
PERANGKAT DAERAH S/D 2023
DINAS SOSIAL KOTA BANDAR LAMPUNG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output), dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan serta sub Kegiatan s.d tahun (n-3)	TARGET DAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s.d Tahun Berjalan (Tahun 2024)			Lokasi
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2				3	4	5	6	7	8	9 = (7/8) X 100	10	11 + (6+8+1 0)	12=(11/5) X 100	13	
URU SAN							Meningkatnya kemandirian sosial masyarakat			35%						
							Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (nilai sakup OPD)	80	73.65		94 %	74	84	80	100 %	BL

1	0	6	01			I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	%	91,64 %	100 %	167	100 %	100 %	100 %	
			2	08			Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Pemenuhan jasa kebutuhan OPD	%		100 %	136	100 %	100 %	100 %	
			2	08	02	1)	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik yang tersedia	%	45.44 %	100 %	45,79	5 Paket	5 Paket	100 %	
			2	08	04	2)	Penyediaan Jasa pelayanan umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan keuangan kantor yang tersedia	%	91.61%	100 %	89.79	12 Bulan	12 Bulan	100 %	
			2	06			Administrasi Umum Perangkat daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan dasar OPD	%		100 %	-	100 %	100 %	100 %	
			2	06	02	3)	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	%	96.30%	100 %	90,83	1 Paket	1 Paket	100 %	
			2	06	05	4)	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan kantor yang tersedia	%	80.04 %	100 %	81,48	1 Paket	1 Paket	100 %	
			2	06	01	5)	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Jumlah sarana listrik dan penerangan kantor pendukung tugas dan fungsi pegawai	%	96.73 %	100 %	70,76	1 Paket	1 Paket	100 %	
			2	06	03	6)	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan kebersihan dan	%	99,51 %	100 %	81,31	1 Paket	1 Paket	100 %	

								Persentase PMKS yang tertangani	%	88	88		88	77	77	
1	0					II	Program Rehabilitasi sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan	%		88%		88%	77%	77%	
								Presentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%							
			2	01			Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti sosial	Persentase pelayanan Rehabilitasi lansia, penyandang cacat dan orang terlantar yang tertangani	%		100 %		100 %	100 %	100 %	
			2	01	02	20)	Penyediaan sandang	Terlaksananya peningkatan kesejahteraan lansia	134 org	4.24%	4.24%	0	136 org	134 org	134 org	
			2	01	01	21)	Penyediaan permakanan	Terlaksananya Penyandang cacat yang terampil	50 org	4.96%	4.96%	2,53	50 org	50 org	50 org	
								Terlaksananya penanganan anak terlantar				50				
			2	01	03	22)	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah org yg mendapatkan alat bantu dan alat bantu		40.91%	40.91%		50 org	50 org	50 org	

			2	02	14	26)		Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota	Terlaksananya Gelandangan psikotik orgil yang tertib	22 org			85.21%	0,71	22 org	22 org	22 org	
1	06	06	2			III	Program Penanganan Bencana		Presentase Korban Bencana yang menerima Bantuan Sosial selama masa tanggap darurat	%			100%	0	100%	100%	100%	
									Presentase Korban Bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%			100%	0	100%	100%	100%	
			2	01			Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota		Pelayanan Pengelolaan bantuan korban bencana alam dan bencana sosial	kec			100%		100%	20 kec	20 kec	
			2	01	01	27)		Penyediaan makanan	Terlaksananya bantuan Terhadap masyarakat Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	20 kec	20.75 %		20.75 %	75,88	100%	20 kec	20 kec	
			2	01	02	28)		Penyediaan sandang	Jumlah Orang yang mendapatkan Pakaian dan perlengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (Pengungsian)						2250 org	2250 org	2250 org	

								dan Pasca Bencana Kewenangan Kab/Kota								
			2	01	03	29)		<i>Penyediaan tempat penampungan pengungsi</i>	Jumlah Tempat Penampungan Pengungsi Kewenangan Kab/Kota				20 unit	20 unit	20 unit	
			2	01	05	30)		<i>Pelayanan dukungan Psykososial</i>	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Pelayanan Dukungan Psykososial				200 org	200 org	200 org	
1	0	05	2			IV	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Presentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%			24%	2	24%	21%	21%
			2	02			Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Pelayanan pengelolaan pendampingan PKH dan data PMKS PSKS	petugas			24%		24%	21%	21%
			2	02	02	31)	<i>Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota</i>	Terlaksananya Petugas Pendampingan dalam Pencairan Bantuan	169 Petugas pendamping PKH dan 20 TKSK	96.76% %	169 Petugas pendam ping PKH dan 20 TKSK	2,56	169 Petugas pendampi ng PKH dan 20 TKSK	169 Petugas pendampi ng PKH dan 20 TKSK	169 Petugas pendamping PKH dan 20 TKSK	
			2	02	01	32)	<i>Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota</i>	Terlaksananya verval data PMKS dan PSKS yang terlaksana	126 petugas	20.85%	20.85%	10,28	140 org	140 org	100 %	
			2	02	03	33)	<i>Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga</i>	Jumlah KPM yang mendapatkan bantuan social	143180 Keluarga	71.50%						

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai Rencana Strategis Dinas Sosial Periode Tahun 2021-2026, Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta memberikan pelayanan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial kepada PMKS dan PSKS.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Sosial yang digunakan sebagai tolak ukur untuk penanganan pelayanan kesejahteraan sosial.

Pada Tahun 2021 Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial mencapai target sebagaimana diindikasikan oleh Indikator Kinerja Kunci yang tidak memenuhi target.

TABEL TC.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL KOTA BANDAR LAMPUNG

NO.	INDIKATOR	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase PMKS yang tertangani	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti	Presentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	50	50	50	50	100%	100%	100%	100%	Penambahan Anggaran APBD untuk Kegiatan SPM dan SDM Bidang Sosial
		Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	134	134	135	136	100%	100%	100%	100%	
		Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	50	50	50	50	100%	100%	100%	100%	
		Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & pasca bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Persentase korban bencana yang dievaluasi dengan mengutamakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	20 Kec	20 Kec	20 Kec	20 Kec	100%	100%	100%	100%	

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk sikap responsif terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri Direktorat) maupun Pemerintah Provinsi Lampung (Dinas Sosial Kota Bandar Lampung). Secara garis besar kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh kesiapan kualitas sumber daya manusia Aparatur Pemerintah Daerah dan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Berdasarkan Undang-undang yang berlaku untuk menunjang program dan kegiatan yang ada di OPD.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, antara lain:

1. Anggaran yang tidak mencukupi.
2. Kegiatan yang diusulkan masih banyak yang tidak terakomodir
3. Pengusulan dari masyarakat tidak menyesuaikan tupoksi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

Analisis terhadap potensi lingkungan strategis baik internal meliputi kekuatan dan kelemahan, serta faktor-faktor lingkungan eksternal meliputi peluang dan tantangan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, dapat dipetakan sebagai berikut:

1. Faktor lingkungan strategis Internal:

a. Kekuatan:

.Tersedianya SDM aparatur sipil negara dan pegawai penunjang lainnya.

.Tersedianya kantor dan sarana dan prasarana kerja.

.Tersedianya landasan hukum yang kuat yang memberikan kewenangan kepada Dinas Sosial.

b. Kelemahan:

.Kurangnya Jumlah SDM aparatur pada Dinas Sosial dikarenakan Purnabakti , Wafat dan kurangnya jumlah pelaksana.

.Kecenderungan aparatur yang bersikap sebagai koordinator daripada eksekutor.

2. Faktor lingkungan strategis eksternal:

a. Peluang:

.Adanya Elemen masyarakat yang aktif dan partisipatif dalam melaksanakan pembangunan Bidang Sosial;

.Tersedianya peluang kerjasama dan kemitraan dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial;

.Perkembangan teknologi informasi dalam pembangunan Bidang Sosial untuk pengusulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

b. Tantangan/Ancaman:

.Tumpang tindih regulasi yang potensial menimbulkan konflik wewenang antar Perangkat Daerah;

- .Besarnya potensi bencana, baik bencana alam maupun bencana Sosial
- .Bencana sosial berupa kerentanan sosial yang potensial menimbulkan konflik horizontal;

Berdasarkan Analisis Faktor-faktor Peluang dan Potensi yang dimiliki, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung juga Menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi menyelenggarakan Urusan Sosial yang diidentifikasi sesuai kriteria RPJMD Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dalam Bidang Sosial.
 2. Belum optimalnya kualitas lembaga kesejahteraan Sosial.
- isu tersebut diharapkan akan teratasi dengan pelaksanaan pelaksanaan kesejahteraan sosial selama 5 tahun ke depan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam penyusunan rancangan awal rencana kerja OPD harus diperhatikan beberapa aturan baru yang berlaku sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (RenJa) yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2021 tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 dan dengan memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dengan didasari kedua aturan di atas maka penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial 2021-2026 menggunakan nomenklatur baru yang berlaku. Dalam tugasnya melaksanakan sebagian tugas kepala daerah pada urusan Bidang Sosial, OPD mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026, dimana Dinas Sosial Kota Bandar Lampung ditugaskan untuk membantu memenuhi misi “ Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat.”

Dengan fokus tersebut maka Dinas Sosial Bandar Lampung memfokuskan usaha utamanya pada identifikasi potensi masyarakat dan pemanfaatan potensi masyarakat tersebut dalam kontribusinya menopang pengembangan dan penguatan ekonomi daerah.

Tidak ada perubahan signifikan terhadap rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kota Bandar Lampung untuk Tahun 2025.

Hasil review Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 terhadap kebutuhan pada Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

Table T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2025 Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
			Meningkatnya kemandirian sosial masyarakat						Meningkatnya kemandirian sosial masyarakat		
			Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar						Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung		
				77						77	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			100%	4.972.622.118		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			100%	4.972.622.118
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat		
				100%	20.500.000					100%	20.500.000
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Bandar Lampung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Bandar Lampung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
					20.500.000						20.500.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD	100%	3.695.923.321		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD	100%	3.695.923.321
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Bandar Lampung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3	3.586.114.321		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Bandar Lampung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3	3.586.114.321

	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Bandar Lampung	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	109.809.000		Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Bandar Lampung	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	109.809.000
	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah		Presentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100%	550000000		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah		Presentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100%	550000000
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Bandar Lampung	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti	5	5.000.000		Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Bandar Lampung	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti	5	5.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase pemenuhan kebutuhan dasar OPD	100%	207.095.000		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase pemenuhan kebutuhan dasar OPD	100%	207.095.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Bandar Lampung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	10.000.000	129.753.000	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Bandar Lampung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	10.000.000
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Bandar Lampung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	30.000.000		Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Bandar Lampung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	30.000.000
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Bandar Lampung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Disediakan	1	11.000.000		Penyediaan peralatan rumah tangga	Bandar Lampung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Disediakan	1	11.000.000
	Penyediaan bahan logistik kantor	Bandar Lampung	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1	6.500.000		Penyediaan bahan logistik kantor	Bandar Lampung	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1	6.500.000
	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Bandar Lampung	Jumlah Paket Barang Cetak dan yang Disediakan	1	12.348.000		Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Bandar Lampung	Jumlah Paket Barang Cetak dan yang Disediakan	1	12.348.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bandar Lampung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	5.515.000		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bandar Lampung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	5.515.000
	Fasilitasi kunjungan tamu	Bandar Lampung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	4.390.000		Fasilitasi kunjungan tamu	Bandar Lampung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	4.390.000

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bandar Lampung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		50.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bandar Lampung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		50.000.000
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		Pemenuhan jasa kebutuhan OPD	100%	411.860.670		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		Pemenuhan jasa kebutuhan OPD	100%	411.860.670
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bandar Lampung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Disediakan		99.860.670		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bandar Lampung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Disediakan		99.860.670
	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Bandar Lampung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Umum Kantor yang Disediakan		312.000.000		Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Bandar Lampung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Umum Kantor yang Disediakan		312.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Inventaris kantor yang terpelihara	100%	87.243.122		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Inventaris kantor yang terpelihara	100%	87.243.122
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas/ kendaraan dinas jabatan	Bandar Lampung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan rajaknya		38.622.87		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas/ kendaraan dinas jabatan	Bandar Lampung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan rajaknya		38.622.87
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/ lapangan	Bandar Lampung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		24.365.250		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/ lapangan	Bandar Lampung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		24.365.250
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bandar Lampung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	13.000.000		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bandar Lampung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	13.000.000
	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya	Bandar Lampung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		11.000.000		Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya	Bandar Lampung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		11.000.000

	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Bandar Lampung	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial	87%	19.667.115.980		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Bandar Lampung	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial	87%	19.667.115.980
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Presentase Kapasitas Kelembagaan Sosial	81%	19.667.115.980		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Presentase Kapasitas Kelembagaan Sosial	81%	19.667.115.980
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota	Bandar Lampung	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kab/Kota yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kab/Kota	100	250.000.000		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota	Bandar Lampung	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kab/Kota yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kab/Kota	100	250.000.000
	Peningkatan kemampuan kompetensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan		Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	100	107.115.980		Peningkatan kemampuan kompetensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan		Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	100	107.115.980
	Peningkatan kemaMpuan potensi sumber kesejahteraansosial kelembagaan masyarakat kewenangan kab/kota	Bandar Lampung	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	250	19.160.000.000		Peningkatan kemaMpuan potensi sumber kesejahteraansosial kelembagaan masyarakat kewenangan kab/kota	Bandar Lampung	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	250	19.160.000.000
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Bandar Lampung	Jumlah Sarungkat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan	150	150.000.000		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Bandar Lampung	Jumlah Sarungkat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	150	150.000.000
			Persentase PMKS yang tertangani	80					Persentase PMKS yang tertangani	80	

	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Bandar Lampung	Presentase PMKS yang memperoleh bantuan	88%	748.026.213		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Bandar Lampung	Presentase PMKS yang memperoleh bantuan	88%	748.026.213
	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti sosial		Presentase pelayanan Rehabilitasi lansia, penyandang cacat dan orangerlantar yang tertangani	100%	558.026.213		Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti sosial		Presentase pelayanan Rehabilitasi lansia, penyandang cacat dan orangerlantar yang tertangani	100%	558.026.213
	Penyediaan permakanan	Bandar Lampung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	50 org	70.000.000		Penyediaan permakanan	Bandar Lampung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	50 org	70.000.000
	Penyediaan sandang	Bandar Lampung	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	135 org	60.000.000		Penyediaan sandang	Bandar Lampung	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	135 org	60.000.000
	Penyediaan Alat Bantu		Jumlah oarang yang mendapatkan Alat Bantu dan AlatBantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenagan Kabupaten/ Kota	50 org	428.026.213		Penyediaan Alat Bantu		Jumlah oarang yang mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenagan Kabupaten/ Kota	50 org	428.026.213
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Presentase pelayanan pengelolaan rehabilitasi sosial	100%	190.000.000		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Presentase pelayanan pengelolaan rehabilitasi sosial	100%	190.000.000

	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Bandar Lampung	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	110 org	20.000.000		Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Bandar Lampung	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	110 org	20.000.000
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Bandar Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial	1	100.000.000		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Bandar Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial	1	100.000.000
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Bandar Lampung	Presentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	24%	5.760.514.759		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Bandar Lampung	Presentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	24%	5.760.514.759
	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota		Pelayanan pengelolaan pendampingan PKH dan data PMKS PSKS	24%	5.760.514.759		Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota		Pelayanan pengelolaan pendampingan PKH dan data PMKS PSKS	24%	5.760.514.759
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Bandar Lampung	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang didata	19%	150.000.000		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Bandar Lampung	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang didata	19%	150.000.000
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Bandar Lampung	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	55948	1.302.000.000		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Bandar Lampung	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	55948	1.302.000.000
	Fasilitasi Bantuan Sosial kesejahteraan Keluarga	Bandar Lampung	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan	143186	4.308.514.759		Fasilitasi Bantuan Sosial kesejahteraan Keluarga	Bandar Lampung	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan	143186	4.308.514.759
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Bandar Lampung	Presentase Korban Bencana yang menerima Bantuan Sosial selama masa tanggap darurat	100%	250.000.000		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Bandar Lampung	Presentase Korban Bencana yang menerima Bantuan Sosial selama masa tanggap darurat	100%	250.000.000
	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota		Pelayanan Pengelolaan bantuan korban bencana alam dan bencana sosial	16%	250.000.000		Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota		Pelayanan Pengelolaan bantuan korban bencana alam dan bencana sosial	16%	250.000.000

	Penyediaan makanan	Bandar Lampung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	37.024	100.000.000		Penyediaan makanan	Bandar Lampung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	37.024	100.000.000
	Penyediaan Sandang		Jumlah orang yang mendapatkan Pakaian dan Perlengkapan lainnya yang tersedia pada masatanggap darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2.254	50.000.000		Penyediaan Sandang		Jumlah orang yang mendapatkan Pakaian dan Perlengkapan lainnya yang tersedia pada masatanggap darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2.254	50.000.000
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		Jumlah Tempat Penampungan Pengungsi Kewenangan	20	50.000.000		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		Jumlah Tempat Penampungan Pengungsi Kewenangan	20	50.000.000
	Pelayanan Dukungan Psikososial		Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Pelayanan	200	50.000.000		Pelayanan Dukungan Psikososial		Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Pelayanan	200	50.000.000
					31.398.279.070						31.398.279.070

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Terkait dengan usulan program dan kegiatan masyarakat secara keseluruhan berasal dari usulan dari bawah (*bottom-up planning*) yang kemudian dihimpun untuk dibahas dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. Disamping itu usulan program/kegiatan/sub-kegiatan tersebut juga melalui tahapan dan mekanisme mulai dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan yang kemudian dilanjutkan Musrenbang Tingkat Kabupaten/Kota tetapi sebelumnya dibahas di Forum OPD.

Table T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Bandar Lampung	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial	87%	
2	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Presentase Kapasitas Kelembagaan Sosial	81%	
3	Peningkatan kemampuan kompetensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kabupaten/kota	Bandar Lampung	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	100	
4	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kab/kota	Bandar Lampung	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	250	
5	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kab/Kota	Bandar Lampung	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan kewenangan Kab/Kota Yang meningkat kapasitasnya Kewenangan Kab/Kota	100	
6	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Bandar Lampung	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	15	

7			Persentase PMKS yang tertangani	88	
8	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Bandar Lampung	Presentase PMKS yang memperoleh bantuan	88%	
9	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti sosial		Presentase pelayanan Rehabilitasi lansia, penyandang cacat dan orang terlantar yang tertangani	100 %	
10	Penyediaan permakanan	Bandar Lampung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	50 org	
11	Penyediaan sandang	Bandar Lampung	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	135 org	
12	Penyediaan Alat Bantu		Jumlah oarang yang mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenagan Kabupaten/ Kota	50 org	
13	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Presentase pelayanan pengelolaan rehabilitasi sosial	100 %	
14	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Bandar Lampung	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	110 org	

15	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Bandar Lampung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1	
16	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Bandar Lampung	Presentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	24%	
17	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota		Pelayanan pengelolaan pendampingan PKH dan data PMKS PSKS	24%	
18	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Bandar Lampung	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang didata	198	
19	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Bandar Lampung	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	55948	
20	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan keluarga	Bandar Lampung	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan kab/Kota	66505	
21	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Bandar Lampung	Presentase Korban Bencana yang menerima Bantuan Sosial selama masa tanggap darurat	100%	
22	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota		Pelayanan Pengelolaan bantuan korban bencana alam dan bencana sosial	169	

23	Penyediaan makanan	Bandar Lampung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	37.024	
24	Penyediaan Sandang		Jumlah orang yang mendapatkan Pakaian dan Perlengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2.250	
25	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		Jumlah Tempat Penampungan Pengungsi Kewenangan Kabupaten / kota	20	
26	Pelayanan Dukungan Psikososial		Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Pelayanan Dukungan Psikososial	200	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia diarahkan pada pelaksanaan rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Kementerian Sosial sebagai pilar pemerintah memiliki peran strategis untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945, Pancasila, UU Kesejahteraan Sosial dan Perpres No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Peran dan fungsi Kementerian sosial adalah dalam rangka mewujudkan Visi Misi Presiden terutama di bidang sosial. Karena itu Visi Kementerian Sosial selama 5 tahun kedepan (2020-2024) akan mengemban visi pembangunan nasional (Visi Presiden) tahun 2020-2024.

“Kementerian Sosial yang Handal, Profesional, dan Inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden; terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong ”

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Presiden (2020-2024) yang juga digunakan sebagai Visi Kementerian Sosial dilaksanakan 4 (empat) misi yaitu:

Peningkatan kualitas manusia Indonesia

Pembanguna yang merata dan berkeadilan

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya

Sinergi pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Salah satu permasalahan Ekonomi yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran daerah adalah pemulihan ekonomi dalam menekan dampak pandemi COVID-19 yang berakibat pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana sosial berfokus kepada identifikasi potensi di masyarakat dan pembinaan tersebut yang selaras dengan Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan sasaran meningkatnya kesejahteraan rakyat yaitu:

- a. Memberikan layanan langsung untuk memberikan perlindungan PMKS serta mencegah PMKS dari keterpurukan akibat risiko sosial, perlakuan salah, tindak kekerasan dan eksploitasi sosial;
- b. Memberikan dukungan bagi PMKS baik kelompok rentan maupun kelompok beresiko sosial dalam menghadapi masalah kebencanaan, perlakuan salah, tindak kekerasan dan eksploitasi sosial;
- c. Meningkatkan kemauan dan kemampuan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar;
- d. Meningkatkan kemampuan dan kemauan masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial dan dunia usaha dalam pemberdayaan sosial;
- e. Tersedianya layanan PMKS (anak, lanjut usia, penyandang cacat, korban napza dan tuna sosial) sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) secara nasional;
- f. Penguatan Keagamaan.

PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Guna Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung menyangkut permasalahan Sosial seperti hal krisis yang terkait dan permasalahan yang dihadapi serta hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi. Tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas.

2. Rekapitulasi Program dan Kegiatan meliputi:

Sifat penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan.

1. Program Rehabilitasi Sosial , melalui penyelenggaraan kesejahteraan lansia, anak terlantar, orang terlantar, gelandangan pengemis dan penyandang cacat.
2. Program Penanganan Bencana melalui pelayanan Bencana Alam dan Bencana Sosial.
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, melalui Pengelolaan Data PMKS dan PSKS serta Pendampingan Keluarga Penerima Manfaat.
4. Program Pemberdayaan Sosial melalui Penyelenggaraan Kelembagaan Sosial.

3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Dinas Sosial Kota Tahun 2025 dalam merumuskan Program dan Kegiatan telah sesuai dengan Rancangan OPD jika terdapat ketidak sesuaian maka diadakan perubahan atau pergeseran.

4. Tabel Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dirumuskan dalam Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan 2025 dan perkiraan maju tahun 2026 Kegiatan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan Pemetaan

Renja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung T.A 2025

Table T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju
Tahun 2026
Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya kemandirian sosial masyarakat							
		Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (nilai saki OPD)		77				78	
1 06 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Bandar Lampung	100 %	4972622118	APBD		100 %	5221253224
1 06 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas		100 %	20.500.000	APBD		100 %	21525000
1 06 01 2.01 000 1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bandar Lampung	3	20.500.000	APBD		3	21525000
1 06 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel		100 %	3695923321	APBD		100 %	3880719487
1 06 01 2.02 000 1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bandar Lampung	33	3586114321	APBD		33	3765420037
1 06 01 2.02 000 3	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bandar Lampung	4	109809000	APBD		4	115299450
1 06 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		100%	5.500.000	APBD		100%	5.775.000
1 06 01 2.05 000 9	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Bandar Lampung	5	5.500.000	APBD		5	5.775.000
1 06 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar OPD		100 %	207095000	APBD		100 %	217449750
1 06 01 2.06 000 1	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bandar Lampung	1	10.000.000	APBD		1	10500000
1 06 01 2.06 000 2	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bandar Lampung	1	30000000	APBD		1	31500000
1 06 01 2.06 000 3	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Bandar Lampung	1	11000000	APBD		1	11550000
1 06 01 2.06 000 4	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Bandar Lampung	1	6500000	APBD		1	6825000
1 06 01 2.06 000 5	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Bandar Lampung	1	12348000	APBD		1	12965400
1 06 01 2.06 000 6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bandar Lampung	1	5515000	APBD		1	5790750
1 06 01 2.06 08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bandar Lampung	1	4390000	APBD		1	4609500
1 06 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bandar Lampung	1	50000000	APBD		1	52500000
1 06 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					APBD			
1 06 01 2.07 000 6	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	Bandar Lampung	1		APBD		1	
1 06 01 2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Pemenuhan jasa kebutuhan OPD		100	411860670	APBD		1	432453703
1 06 01 2.08 000 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	Bandar Lampung	1	99860670	APBD		1	104853703
1 06 01 2.08 000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor yang Disediakan	Bandar Lampung	1	312000000	APBD		1	327600000
1 06 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris kantor yang terpelihara		100 %	87243127	APBD		100 %	91605283,35

Renja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung T.A 2025

1	06	01	2.09	000 1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas/ kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Bandar Lampung	1	38622877	APBD	1	40554020,85
1	06	01	2.09	000 2	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/ lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bandar Lampung	1	24365250	APBD	1	25583512,5
1	06	01	2.09	000 9	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bandar Lampung	15	13000000	APBD	15	13650000
1	06	01	2.09	001 1	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bandar Lampung	3	11000000	APBD	3	11550000
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial	Bandar Lampung	87%	19667115980	APBD	87%	20650471779
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Kapasitas Kelembagaan Sosial		81%	19667115980	APBD	82%	20650471779
1	06	02	2.03	000 2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kab/Kota	Bandar Lampung	100	250000000	APBD	100	262500000
1	06	02	2.03	000 3	Peningkatan kemampuan kompetensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Bandar Lampung	100	107115980	APBD	100	112471779
1	06	02	2.03	000 4	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Bandar Lampung	250	19160000000	APBD	250	20118000000
1	06	02	2.03	000 5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Bandar Lampung	15	150000000	APBD	15	157500000
					Presentase PMKS yang tertangani			88		APBD	88	
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Presentase PMKS yang memperoleh bantuan	Bandar Lampung	88%	748026213	APBD	88%	785427523,65
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti sosial	Presentase pelayanan Rehabilitasi lansia, penyandang cacat dan orang terlantar yang tertangani		100 %	100 %	APBD	100 %	100 %
1	06	04	2.01	000 1	Penyediaan permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar GizMinimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Bandar Lampung	50 org	70000000	APBD	50 org	73500000
1	06	04	2.01	000 2	Penyediaan sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakailan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Bandar Lampung	135 org	60.000.000	APBD	136 org	63000000
1	06	04	2.01	000 3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah oarang yang mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota		50 org	428026213	APBD	50 org	449427523,65
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Presentase pelayanan pengelolaan rehabilitasi sosial		100 %	190.000.000	APBD	100 %	199500000
1	06	04	2.02	000 8	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga(PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS danNAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Bandar Lampung	110 org	20.000.000	APBD	110 org	21000000
1	06	04	2.02	001 4	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Bandar Lampung	1	170000000	APBD	1	178500000
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Bandar Lampung	24%	5760514759	APBD	24%	6048540496,95

1	06	05	2.02		Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Pelayanan pengelolaan pendampingan PKH dan data PMKS PSKS		24%	5760514759	APBD		24%	6048540496,95
1	06	05	2.02	000 1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang didata	Bandar Lampung	198	150000000	APBD		198	157500000
1	06	05	2.02	000 3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Bandar Lampung	66550	4308514759	APBD		66550	4523940496,95
1	06	05	2.02	000 2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Bandar Lampung	55948	1302000000	APBD		55948	1367100000
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Presentase Korban Bencana yang menerima Bantuan Sosial selama masa tanggap darurat	Bandar Lampung	100%	250000000	APBD		100%	262500000
1	06	06	2.01		Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	Pelayanan Pengelolaan bantuan korban bencana alam dan bencana sosial		169	250000000	APBD		169	262500000
1	06	06	2.01	000 1	Penyediaan makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Bandar Lampung	37.024	100000000	APBD		37.024	105000000
1	06	06	2.01	000 2	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang mendapatkan Pakailan dan Perlengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		2.250	500.000.000	APBD		2.250	52500000
1	06	06	2.01	000 3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Penampungan Pengungsi Kewenangan Kabupaten / kota		20	50000000	APBD		20	52500000
1	06	06	2.01	000 5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Pelayanan Dukungan Psikososial		200	50000000	APBD		200	52500000
									31.398.279.070				31.398.279.070

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
										2025						
										Target	APBD	DAK	Rupiah			
1	2	3					4	5	6					9	10	
Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat								Meningkatnya kemandirian sosial masyarakat								
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Dinas Sosial							Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (nilai saki OPD)		77						
		1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		%	100 %	4972622118		4972622118	Dinas Sosial	Bandar Lampung	
		1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	%	100 %	20.500.000		20.500.000			
		1	06	01	2.01	0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	20.500.000		20.500.000	Dinas Sosial	Bandar Lampung	
		1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	%	100 %	3695923321		3695923321			
		1	06	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	33	3586114321		3586114321	Dinas Sosial	Bandar Lampung	
		1	06	01	2.02	0003	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	109.809.000		109.809.000	Dinas Sosial	Bandar Lampung	
		1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	%	100%	5.500.000		5.500.000			
		1	06	01	2.05	0009	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	5	5.500.000		5.500.000	Dinas Sosial	Bandar Lampung	
		1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan dasar OPD		100 %	207095000		207095000			
		1	06	01	2.06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10.000.000		10.000.000	Dinas Sosial	Bandar Lampung	
		1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	30000000		30000000	Dinas Sosial	Bandar Lampung	
		1	06	01	2.06	0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	11000000		11000000	Dinas Sosial	Bandar Lampung	
		1	06	01	2.06	0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Paket	1	6500000		6500000	Dinas Sosial	Bandar Lampung	
		1	06	01	2.06	0005	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	12348000		12348000	Dinas Sosial	Bandar Lampung	
		1	06	01	2.06	0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	5515000		5515000	Dinas Sosial	Bandar Lampung	
		1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	4.390.000		4.390.000	Dinas Sosial	Bandar Lampung	
		1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	50000000		50000000	Dinas Sosial	Bandar Lampung	
		1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
		1	06	01	2.07	0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	Unit	1				Dinas Sosial	Bandar Lampung	
		1	06	01	2.08		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Pemenuhan jasa kebutuhan OPD	Persen	100	411860670		411860670			
		1	06	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	Laporan	1	99860670		99860670	Dinas Sosial	Bandar Lampung	

		1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	312000000		312000000	Dinas Sosial	Bandar Lampung
		1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris kantor yang terpelihara	%	100 %	87243127		87243127		
		1	06	01	2.09	0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas/ kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	38622877		38622877	Dinas Sosial	Bandar Lampung
		1	06	01	2.09	0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/ lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	24365250		24365250	Dinas Sosial	Bandar Lampung
		1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	13000000		13000000	Dinas Sosial	Bandar Lampung
		1	06	01	2.09	0011	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	11000000		11000000	Dinas Sosial	Bandar Lampung
		1	06	02			PROGRAM PEMERDAYAAN SOSIAL	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial	%	87%	19667115980		19667115980	Dinas Sosial	Bandar Lampung
		1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Kapasitas Kelembagaan Sosial	%	81%	19667115980		19667115980		
		1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kab/Kota		100	250000000		250000000	100	Bandar Lampung
		1	06	02	2.03	0003	Peningkatan kemampuan kompetensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	100	107115980		107115980	Dinas Sosial	Bandar Lampung
		1	06	02	2.03	0004	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kab/kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	250	19160000000		19160000000	Dinas Sosial	Bandar Lampung
		1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifikat	15	150000000		150000000	Dinas Sosial	Bandar Lampung
	Meningkatnya kualitas hidup, kemandirian, keberfungsian sosial dan kesejahteraan							Persentase PMKS yang tertangani		88					
	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Presentase PMKS yang memperoleh bantuan	%	88%	748026213		748026213	Dinas Sosial	Bandar Lampung
		1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti sosial	Presentase pelayanan Rehabilitasi lansia, penyandang cacat dan orang terlantar yang tertangani	%	100 %	100 %	100 %	100 %		
		1	06	04	2.01	0001	Penyediaan permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50 org	70000000		70000000	Dinas Sosial	Bandar Lampung
		1	06	04	2.01	0002	Penyediaan sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	135 org	60.000.000		60.000.000	Dinas Sosial	Bandar Lampung
		1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50 org	428026213		428026213		
		1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Presentase pelayanan pengelolaan rehabilitasi sosial	%	100 %	190.000.000		190.000.000		
		1	06	04	2.02	0008	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Orang	110 org	20.000.000		20.000.000	Dinas Sosial	Bandar Lampung
		1	06	04	2.02	0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	1	170.000.000		170.000.000	Dinas Sosial	Bandar Lampung

		1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	24%	5760514759		5760514759	Dinas Sosial	Bandar Lampung
		1	06	05	2.02		Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Pelayanan pengelolaan pendampingan PKH dan data PMKS PSKS	%	24%	5760514759		5760514759		
		1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang didata	Orang	198	150000000		150000000	Dinas Sosial	Bandar Lampung
		1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang didata	Orang	279.740	1302000000		1302000000	Dinas Sosial	Bandar Lampung
		1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Keluarga	66.550	4308514759		4308514759	Dinas Sosial	Bandar Lampung
		1	06	06			Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	%	100%	250000000		250000000	Dinas Sosial	Bandar Lampung
								Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap							
		1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Pelayanan Pengelolaan, Bantuan Korban Bencana Alam dan Bantuan Sosial	%	100%	250000000		250000000	Dinas Sosial	Bandar Lampung
		1	06	05	2.01	0001	Penyediaan makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perumahan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	185.120	100000000		100000000	Dinas Sosial	Bandar Lampung
		1	06	05	2.01	0002	Penyediaan sandang	Jumlah orang yg mendapatkan pakailan dan kelengkapan lainnya yg tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana kewenangan kab/kota.	Orang	9000	50000000		50000000	Dinas Sosial	Bandar Lampung
		1	06	05	2.01	0003	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Jumlah tempat penampungan pengungsi kewenangan kab/kota	Unit	3	50000000		50000000	Dinas Sosial	Bandar Lampung
		1	06	05	2.01	0004	Pelayanan dukungan psikososial	Jumlah korban bencana yg mendapatkan pelayanan dukungan psikososial	Orang	800	50000000		50000000	Dinas Sosial	Bandar Lampung
											31.398.279.070		31.398.279.070		

BAB V

PENUTUP

Renja menjadi sangat penting artinya dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau *Community Base Development* (CBD), melalui keterlibatan lebih banyak para pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya sampai ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Renja Dinas Sosial adalah Rencana Program dan Kegiatan Tahunan yang disusun sesuai dengan Tupoksi, Tujuan dan sasaran Dinas Sosial.

Renja Dinas Sosial menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 yang diharapkan dapat memberikan umpan balik yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan dan jajaran pelaksana. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,



EVA DWIANA